

**KARAKTERISTIK DAN BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA
NOTARIS**

Jurnal



Oleh:

INA ZAKHINA

NIM: 141060200111003

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2016

KARAKTERISTIK DAN BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS

Ina Zakhina¹, Rachmad Safa'at², Istislam³

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono Nomor 169, Malang
Email: inazakhina@gmail.com

Abstract

The Writing this journal discusses the legal issues regarding the setting Guild Civil Notaries in Article 20 of Law No. 2 of 2014 on the amendment of Law No. 30 of 2004 on the Rules of Notary . The purpose of writing this journal to analyze and assess the fellowship oerdata notary regulated in Law Notary has similar characteristics with article 1819 KUHPdt and analyze form a civil partnership notary in accordance with the character and profession of notary. The method used in this thesis normative. The approach used is Pendekan Legislation, Conceptual Approach, And Comparison Approach. the results of this journal found the Guild civil notary arranged in UUJN - P is a civil partnership that aims not run the company in terms of commercial, profit is not a part or orientation in running profesinya.Persekutuan civil notary can not be said to run a company but a civil partnership in the sense office together . Then In the practice of communion civil notary conceptualized as a form of cooperation in which two or more notaries hire one building and occupied it together, with the division of the rooms inside the building as the office of each notary in communion civil, the client is expected to elect a notary where in the building that used his services.

Key words: *civil partnership, notary, agreement*

Abstrak

Penulisan jurnal ini membahas permasalahan hukum mengenai Pengaturan Persekutuan Perdata Notaris dalam Pasal 20 Undang-undang No 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Tujuan penulisan jurnal ini untuk menganalisis dan mengkaji persekutuan oerdata notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki karakter yang sama dengan pasal 1819 KUHPdt dan menganalisis bentuk persekutuan perdata

¹ Mahasiswa Program Pasca sarjana Magister Kenotariatan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2014.

² Dosen Pembimbing I,Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

³ Dosen Pembimbing II,Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

notaris yang sesuai dengan karakter dan profesi notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Dan Pendekatan Perbandingan.

Hasil dari penelitian tesis ini menemukan Persekutuan perdata notaris yang diatur dalam UUJN-P adalah persekutuan perdata yang bertujuan tidak menjalankan perusahaan dalam artian komersil, keuntungan bukan menjadi bagian atau orientasi dalam menjalankan profesinya. Persekutuan perdata notaris tidak dapat dikatakan menjalankan perusahaan melainkan persekutuan perdata dalam arti kantor bersama. Kemudian Didalam praktek persekutuan perdata notaris dikonsepkan sebagai bentuk kerjasama dimana dua atau lebih notaris menyewa satu gedung dan menempatnya bersama-sama, dengan pembagian ruangan-ruangan dalam gedung tersebut sebagai kantor dari masing-masing notaris dalam persekutuan perdata tersebut, klien diharapkan secara bebas memilih notaris mana dalam gedung tersebut yang akan digunakan jasanya.

Kata kunci: persekutuan perdata, notaris, perjanjian

Latar Belakang

Pasal 20 UUJN mengatur bahwa notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan tidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya, bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud diatur oleh para notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan notaris dalam bentuk perserikatan perdata diatur dalam Peraturan Menteri.

Sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 20 UUJN, ditetapkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.02.12.TAHUN 2010 pada tanggal 8 Februari 2010 yang memberikan kepastian hukum dan landasan bagi para notaris di Indonesia dalam mendirikan perserikatan perdata.

Munculnya ketentuan bahwa notaris di Indonesia dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata notaris merupakan salah satu

upaya pemerintah untuk mendukung peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia di bidang kenotariatan, dan meningkatkan pengetahuan serta keahlian para notaris.

Berdasarkan konsep perserikatan perdata dalam UUJN tersebut, mengindikasikan bahwa notaris dapat membentuk suatu wadah kerjasama.

Pembentukan perserikatan perdata notaris juga diharapkan dapat memaksimalkan pemberian pelayanan kepada publik. Dengan berkantor pada kantor yang sama para Notaris dapat saling berbagi ilmu dan pengalaman, karena seorang Notaris mungkin saja ahli dalam bidang hukum pertanahan dan hukum waris, tetapi kurang menguasai hukum pasar modal misalnya, sehingga dengan berbagi ilmu dan pengalaman tersebut dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik.⁴

Berdasarkan Pasal 1618 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdt), persekutuan perdata merupakan suatu “perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya” menurut Pasal ini syarat persekutuan perdata ialah adanya pemasukan sesuatu kedalam persekutuan (*inbreng*), dan ada pula pembagian keuntungan dari hasil pemasukan tersebut, suatu persekutuan perdata dibuat berdasarkan perjanjian oleh para pihak yang mendirikaninya, dalam perjanjian itu para pihak berjanji memasukkan sesuatu (modal) kedalam persekutuan, dan hasil dari usaha yang dijalankan (keuntungan) kemudian dibagi diantara para pihak sesuai dengan perjanjian.⁵

⁴ Yasmin Mersi, “Kemandirian Notaris Dalam Perserikatan Perdata Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, <http://mersiyasmin.blogspot.co.id/2012/01/kemandirian-notaris-dalam-perserikatan.html> , diakses 12 Februari 2016.

⁵ Gunawan Widjaya, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis : Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Komanditer*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 9.

Menurut Lumbang Tobing, dalam hal menjalankan perserikatan perdata notaris perlu adanya pertimbangan terlebih dahulu sebelum menjalankannya, adapun pertimbangan untuk tidak memperkenankan para notaris mengadakan perserikatan perdata antara lain perserikatan yang seperti ini tidak menguntungkan bagi masyarakat umum, oleh karena hal itu berarti mengurangi persaingan dan pilihan masyarakat tentang notaris yang dikehendaknya, lebih lebih ditempat dimana hanya ada beberapa notaris. Selain dari itu adanya perserikatan diantara para notaris akan menyebabkan kurang terjaminya kewajiban merahasiakan yang dibebankan kepada para notaris. Sebaliknya dapat juga dikemukakan alasan untuk memperkenankan para notaris mengadakan persekutuan di dalam menjalankan jabatan mereka sebagai notaris, yakni bagi para notaris yang berusia lanjut dalam hal ini tentu mereka menginginkan untuk mengurangi kesibukan mereka sebagai notaris. Akan tetapi tidak dapat dilupakan, bahwa walaupun hal tersebut merupakan alasan yang kuat namun di dalam mempertimbangkannya harus diutamakan kepentingan umum, sebagaimana tujuan notaris diangkat.⁶

Kekhawatiran Lumbang Tobing didasarkan pada sumpah jabatan notaris yang antara lain adalah menjamin kerahasiaan terhadap akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya sebagai pejabat umum, dengan perserikatan perdata kerahasiaan klien akan sangat riskan untuk dipertahankan, disamping itu belum jelasnya konsep pemikiran tentang perserikatan perdata.

Ditengah masi berkembangnya polemik mengenai perserikatan perdata notaris, UUJN telah dirubah dengan diundangkannya UUJN-P. mengingat asas hukum *Lex posterior derogat Lex priori* yang berarti undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu, maka jika ada pertentangan undang-undang lama dengan yang baru, maka yang

⁶ GHS. Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Ke-4, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 102.

diberlakukan tetap undang-undang yang baru.⁷ dengan demikian, apabila terjadi pertentangan antara UUJN dengan UUJN-P maka yang berlaku adalah UUJN-P.

Terdapat beberapa ketentuan pada Pasal-Pasal dalam UUJN yang berubah ataupun dihapus dengan berlakunya UUJN-P. Khususnya pada Pasal 20 yang mengatur tentang persekutuan perdata notaris, perubahan tersebut antara lain istilah perserikatan dirubah menjadi istilah perserikatan serta ayat (3) yang berisi “ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan notaris sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri” dihapus. Dari uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah penelitian ini :

1. Apakah persekutuan perdata notaris yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memiliki karakter yang sama dengan Pasal 1819 KUHPdt ?
2. Bagaimana bentuk persekutuan perdata notaris yang sesuai dengan karakter dan profesi notaris?

Penelitian yang dilakukan untuk tesis ini, penelitian hukum normatif (normative legal research), suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.

Pada penulisan tesis ini, peneliti mengkaji persekutuan perdata yang ada pada Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang peraturan jabatan notaris yang dalam Pasal 20 disebutkan tentang peraturan notaris yang dapat membentuk suatu persekutuan perdata yang pada peraturan sebelumnya hanya sebatas perserikatan perdata. Menemukan karakteristik dan bentuk yang ideal pada undang-undang jabatan notaris, dan apakah praktik notaris dapat dijalankan dengan menggunakan

⁷ Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 34.

persekutuan perdata. Sehingga dapat memberikan kejelasan pada praktik notaris dimasa yang akan datang.

Dalam penulisan penelitian tesis ini, jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁸ Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan ketentuan yang mengatur mengenai persekutuan perdata dalam praktik notaris, dimana di dalam pengaturannya masih terdapat hal hal yang tidak diatur secara tegas dan jelas.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi

⁸ Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Sumur Bandung, 1960), hlm. 51.

peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁹

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep konsep terhadap persekutuan perdata dalam praktik notaris agar menemukan karakteristik dan bentuk yang ideal persekutuan perdata notaris dan dalam pengaturannya tidak terdapat interpretasi ganda yang dalam pelaksanaannya dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak notaris ataupun klien yang datang;

Pendekatan perbandingan (comparative approach) dilakukan untuk melihat perbandingan antara satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain, sehingga dapat diketahui baik persamaan maupun perbedaannya yang akan sangat membantu dalam proses analisis.¹⁰ Dalam hal ini digunakan perbandingan antara UUJN dengan UUJN-P serta KUHPdt yang mengatur mengenai persekutuan perdata.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu bahan hukum Primer dan Sekunder. Bahan primer yaitu bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat kedalam isi dan substansi yang dikaji.¹¹ Bahan hukum primer tersebut berupa Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum tambahan yang diperoleh dari internet atau artikel dari media cetak dan elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Bahan hukum sekunder tersebut berupa jurnal maupun artikel-artikel hukum.

Teknik memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu teknik memperoleh bahan hukum Primer dan Teknik memperoleh bahan hukum Sekunder. Teknik bahan hukum primer menggunakan penelusuran terhadap berbagai dokumen hukum, studi arsip serta studi pustaka di Pusat Dekomentasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Pusat Dekomentasi

⁹ *Ibid.*, hlm. 95.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 139.

¹¹ Ammirudin, *Pengantar Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31.

Universitas Brawijaya. Sedangkan Bahan hukum sekunder melalui media elektronik seperti situs internet.¹²

Data yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas permasalahan persekutuan perdata pada praktik notaris. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahannya yang bersifat kongkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada dianalisis menggunakan penafsiran yang sistematis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia mengatur mengenai persekutuan perdata dalam praktek notaris, sehingga menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat mengatur tentang persekutuan perdata dalam praktik notaris sehingga dapat menemukan peraturan dan ketentuan persekutuan perdata dalam praktik notaris.

Pembahasan

A. Karakteristik Persekutuan Perdata Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Persekutuan perdata adalah padanan dan terjemahan dari *burgerlijk maatschap* (*private partnership*). Di dalam sistem common law dikenal dengan istilah *partnership*. Kemudian di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *sharikah* atau *shirkah*.¹³

Ketentuan pasal 1618 KUHPdt tentang definisi persekutuan didasarkan atas perjanjian yang dibuat antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.

¹³ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 26.

yaitu memasukkan sesuatu (*inbreng*) ke dalam persekutuan dengan tujuan mencari keuntungan. Menurut Chindir Ali, persekutuan perdata diartikan sebagai “suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu (*inbreng*) ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan (kemanfaatan) yang diperoleh karenanya”¹⁴

Persekutuan perdata sebagaimana definisi diatas di dalamnya terkandung unsur-unsur:¹⁵

1. pembentukan persekutuan didasar atas perjanjian timbal balik
2. adanya *inbreng* yang artinya masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang dan lainnya ataupun kerajinannya ke dalam perseroan. Dan wujud dari *inbreng* dapat berupa uang, barang ataupun tenaga
3. dengan tujuan membagi keuntungan diantara orang-orang yang terlibat

selain unsur-unsur tersebut diatas terdapat unsur (*essentialia*) tambahan, yaitu dapat berupa aktivitas, hak menentukan dan kedudukan yang sama.¹⁶

Notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata ditemui dalam Pasal 20 UUJN-P, bahwa notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya, namun dalam UUJN-P tidak memberikan definisi mengenai persekutuan perdata notaris yang dimaksud. Persekutuan perdata notaris kemudian disebut perjanjian kerja sama antara para notaris dalam menjalankan jabatannya masing-masing sebagai notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta dengan bergabung dalam satu kantor bersama notaris.

¹⁴ Chindir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 133.

¹⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, buku kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 21.

¹⁶ Herlien Budiono, Makalah pada “seminar tentang Problematika dan Perspektif Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas”, (Hotel Puri Gunung, Lembang, Bandung: 17 Oktober 2012), hlm. 9-11.

Memasukkan dalam persekutuan perdata notaris dapat berupa tenaga kerja maupun modal. Para teman sekutu akan memasukkan semua daya (kemampuan) kerja mereka. Tetapi hal ini tidak termasuk tentang semua fungsi- fungsi turunan yang dibayar seperti bekerja selaku arbiter (wasit), curator, atau pengurus (bewindvoerder), fungsionaris dari organisasi profesi, anggota suatu komisi, staf pengajar tagihan yang muncul atau pembayaran yang diperoleh dari fungsi- fungsi turunan tidak akan diambil atau dimasukkan ke dalam persekutuan perdata, akan tetapi menjadi hak atau tanggungan pribadi teman sekutu. Sekutu wajib memberitahukan kepada teman sekutu lainnya fungsi-fungsi turunan apa yang sedang diembannya sebelum persekutuan didirikan maupun yang setelah pendirian persekutuan perdata dan akan tetap menjadi hak atau tanggungan pribadi teman sekutu tersebut. Fungsi turunan yang dilarang untuk dilakukan dan diterima para sekutu tanpa adanya persetujuan sebelumnya dari teman sekutu lainnya yaitu fungsi turunan yang tidak mungkin diemban dengan resiko waktu yang tersita sangat besar, sehingga tugas sehari-hari untuk menjalankan jabatannya sebagai notaris tidak dapat terpenuhi, dan fungsi turunan tersebut tidak memberikan pemasukan kepada persekutuan, kemudian fungsi yang akan mengganggu kepentingan persekutuan, fungsi yang bersifat politik.

Pemasukan berupa modal, di dalam pembukuan perserikatan akan dibuatkan rekening modal terpisah di dalam mana akan dicatatkan sebagai pemasukan apa yang dibawa masuk oleh teman sekutu, dibawa masuk dalam hal sebagai modal persekutuan, rekening modal dari setiap teman sekutu harus memiliki saldo yang sama, kecuali jika ditentukan lain oleh teman anggota persekutuan. Perubahan atas pemasukan modal untuk masing masing teman sekutu melalui kesepakatan bersama dengan memperhatikan penyelenggaraan kebijakan keuangan yang baik.

Persekutuan perdata notaris yang diatur dalam UUJN-P adalah persekutuan perdata yang bertujuan tidak menjalankan perusahaan dalam artian komersil, para notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata notaris sebagai

pejabat umum yang menjalankan profesi yang demban sebagai tanggung jawab pekerjaan, keuntungan bukan menjadi bagian atau orientasi dalam menjalankan profesinya.

Notaris melakukan pekerjaannya atas dasar dan alasan idiil yang secara teratur dan mandiri dalam bidang tertentu yang memiliki kualitas pribadi yang sangat terpelajar dalam bidangnya dan didasarkan pada kedudukannya sebagai pejabat umum. Persekutuan perdata notaris tidak dapat dikatakan menjalankan perusahaan melainkan persekutuan perdata dalam arti kantor bersama.

Perihal tanggung jawab anggota atau teman sekutu, teman sekutu bertanggung jawab akta yang dibuat olehnya atau dihadapannya, semua dokumen dan atau protokol yang berada dalam penyimpanannya, semua akta yang dibuat olehnya atau di hadapannya, dokumen atau protokol yang dalam penyimpanannya, sebelum notaris yang bersangkutan mengikatkan diri kedalam persekutuan perdata notaris, dan laporan keuangan. Para teman sekutu bertanggung jawab atas semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan teman sekutu termasuk semua dokumen dan atau protokol yang berada dalam penyimpanan teman atau anggota sekutu; semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan teman atau anggota sekutu termasuk pula dokumen atau protokol yang berada dalam penyimpanan sebelum teman atau anggota sekutu yang bersangkutan mengikatkan dirinya ke dalam persekutuan perdata notaris; laporan keuangan persekutuan perdata notaris.

Penggunaan istilah tanggung gugat merupakan kecenderungan yang terjadi di kalangan ahli hukum perdata, sedangkan ahli hukum pidana lebih suka menggunakan istilah tanggung jawab. Tanggung gugat merupakan terjemahan dari istilah belanda *aansprakelijkheid* yang sepadan dengan istilah bahasa inggris *liability*. Baik *aansprakelijkheid* maupun *liability* digunakan untuk membedakan maknanya dari istilah berbahasa belanda *verantwoordelijkheid* maupun *responsibility* dalam bahasa inggris yang lebih sering digunakan dalam bahasa hukum pidana. Kedua istilah itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan

istilah tanggung jawab.¹⁷ Dengan demikian tanggung gugat diartikan sama dengan tanggung jawab, tetapi tanggung jawab lebih luas maknanya dalam lingkup hukum, sedangkan tanggung gugat hanya sebatas hukum perdata berkaitan dengan masalah ganti rugi.

Dalam kata lain kantor bersama notaris dalam persekutuan perdata yang dapat terjadi antara pribadi-pribadi yang melakukan pekerjaan atau jabatannya. Dalam bentuk ini para notaris tidak mengutamakan modal dan keuntungan sebagai unsur utamanya. Masing-masing notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata tersebut tetap bertindak untuk dirinya sendiri, sehingga persekutuan perdata hanyalah bertujuan untuk bersama dalam kantor yang sama.

Di dalam praktek para notaris harus bertanggung jawab berdasarkan pekerjaan mereka masing-masing terhadap semua akta yang dibuat oleh dan dihadapannya dan kepada kliennya masing-masing.

B. Bentuk Persekutuan Perdata Notaris Yang Sesuai Dengan Karakter Dan Profesi Notaris

Persekutuan perdata umumnya didasarkan atas perjanjian yang dibuat oleh sekutunya, para sekutu memasukan inbreng untuk kepentingan modal persekutuan dan pembagian keuntungan berdasarkan inbreng yang dimasukan dalam persekutuan tersebut. Pada persekutuan perdata dikenal adanya sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif bertanggung jawab atas persekutuan sedangkan sekutu pasif hanya sebatas inbreng yang dimasukan dalam persekutuan

UUJN telah dirubah dengan diundangkannya UUJN-P. mengingat asas hukum *Lex posterior derogat Lex priori* yang berarti undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu, maka jika ada pertentangan undang-undang lama dengan yang baru, maka yang diberlakukan tetap undang-undang yang baru. Maka dengan adanya hal seperti ini

¹⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 280-281.

membatalkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : M.HH.01.AH.02.12. Tahun 2010 tentang persyaratan menjalankan jabatan notaris dalam bentuk perserikatan perdata, karena pada pasal yang memuat ketentuan ini dihapus dalam UUJN-P. Beralihnya perserikatan perdata notaris ke persekutuan perdata notaris menimbulkan beberapa penafsiran karena dalam UUJN-P tidak diatur lebih lanjut mengenai persekutuan perdata notaris, bahkan di dalam penjelasan Pasal 20 UUJN-P juga tidak ada penjelasan tentang persekutuan perdata notaris. Hal ini menimbulkan kekaburan peraturan dalam pasal 20 UUJN-P dan ketidakpastian hukum.

Kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, di samping yang lainnya yakni kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plural dalam interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal usul dari mana dia berada. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum tidak akan terlepas dari fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum yang terpenting adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia dalam masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena ia dapat mengadakan perhitungan atau prediksi tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa ia harapkan.

Adapun pertimbangan untuk tidak memperkenankan para notaris untuk mengadakan perserikatan adalah karena perserikatan tidak menguntungkan bagi masyarakat umum. Dikatakan tidak menguntungkan karena perserikatan akan mengurangi persaingan dan pilihan masyarakat terhadap notaris yang dikehendakinya. Selain itu dikhawatirkan perserikatan semacam ini akan menyebabkan kurang terjaminnya kewajiban merahasiakan yang dibebankan kepada para notaris.

Sementara dalam dunia kenotariatan, tidak mengenal cara pembagian keuntungan menurut ketentuan sebagaimana termaktub diatas. Sebab, dikarenakan Jabatan Notaris merupakan Profesi Luhur yang mempunyai

kewenangan yang sama, sehingga menempatkan para notaris dalam posisi sederajat. Tentunya para notaris akan mendapatkan Honorarium langsung dari kliennya masing-masing. Dengan demikian, penerapan persekutuan perdata Notaris tidak lebih kepada kantor bersama.

Didalam praktek persekutuan perdata notaris dikonsepkan sebagai bentuk kerjasama dimana dua atau lebih notaris menyewa satu gedung dan menempatnya bersama-sama, dengan pembagian ruangan-ruangan dalam gedung tersebut sebagai kantor dari masing-masing notaris dalam persekutuan perdata tersebut, klien diharapkan secara bebas memilih notaris mana dalam gedung tersebut yang akan digunakan jasanya. Para notaris yang tergabung dalam persekutuan tersebut dapat mempunyai komputer sendiri-sendiri dan dapat juga mempunyai satu fasilitas baik komputer atau alat-alat kantor secara bersama-sama. Hubungan dengan pihak lain merupakan hubungan secara pribadi demikian juga pertanggungjawabannya.

Jadi persekutuan perdata notaris harus mencerminkan adanya unsur persekutuan diantara sesama notaris, persekutuan yang dimaksudkan disini adalah persekutuan dalam arti sempit yaitu persekutuan dalam arti adanya kebersamaan dalam penggunaan fasilitas perlengkapan kantor, persekutuan diantara para notaris bukanlah suatu persekutuan yang melibatkan para notaris maupun sekutunya dalam suatu tanggungjawab bersama, kesalahan maupun kealpaan yang dilakukan oleh anggota sekutu notaris akan ditanggung oleh masing-masing notaris itu sendiri tanpa mengikat atau melibatkan notaris lainnya.

Persekutuan perdata yang diatur dalam UUJN-P berbeda dengan pengaturan perserikatan perdata yang ada di negeri Belanda, perserikatan yang dilakukan di Belanda adalah bentuk perserikatan yang lebih luas, aturan perserikatan perdata di Belanda juga membenarkan perserikatan diantara profesi yang berbeda, misalnya dalam satu gedung dan dalam suatu fasilitas yang sama

yang ada pada gedung tersebut, dapat digunakan dalam perserikatan perdata yang terdiri dari pengacara, notaris maupun dokter.¹⁸

Penulis menyimpulkan, bahwa persekutuan perdata notaris merupakan hak atau kesempatan yang diberikan kepada para notaris, kemudian untuk selanjutnya dikembalikan kepada masing-masing notaris untuk menggunakan atau tidak kesempatan yang diberikan mendirikan persekutuan perdata notaris dan rambu-rambunya yang diatur dalam KUHPdt dan KUHD ataupun yang nantinya akan digariskan atau diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Sebelumnya notaris dilarang mengadakan perserikatan maupun persekutuan dengan pertimbangan bahwa persekutuan sedemikian tidak menguntungkan bagi masyarakat umum, oleh karena itu berarti mengurangi persaingan dan pilihan masyarakat tentang notaris yang dikehendakinya, terlebih ditempat-tempat yang hanya ada beberapa orang notaris. Selain itu adanya persekutuan diantara notaris dapat menyebabkan kurang terjaminnya kewajiban merahasiakan akta yang dibebankan kepada notaris.

Kemudian dikemukakan alasan untuk memperkenalkan para notaris mengadakan persekutuan didalam menjalankan jabatannya, yaitu bagi mereka notaris yang telah agak lanjut usianya dalam hal mana tentunya mereka menginginkan dapat mengurangi kesibukan mereka sebagai notaris. Akan tetapi tidak boleh dilupakan, bahwa walaupun hal tersebut merupakan alasan yang kuat, namun di dalam mempertimbangkannya harus diutamakan kepentingan umum, untuk mana notaris diangkat.

Ketentuan tersebut dibuat pada tahun 1860 oleh pemerintah Hindia Belanda, diadakan ketentuan larangan berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh bapak Lumban Tobing tersebut adalah sudah tepat dan lagi pada waktu itu mungkin saja pemerintah Hindia Belanda bermaksud bahwa notaris yang jumlahnya sedikit itu hanya untuk kepentingan masyarakat Belanda, Golongan

¹⁸ Tan Thong Ke, *Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 149.

Timur Asing, dan sebagian kecil masyarakat Indonesia yang menundukkan diri pada hukum barat.¹⁹

Berbeda dengan peraturan jabatan notaris yang berlaku di negeri Belanda sendiri yang pada prinsipnya tidak melarang notaris untuk mengadakan persekutuan dalam menjalankan jabatannya. Hal ini menunjukkan segi positif bila notaris diperbolehkan mengadakan persekutuan, tentunya tidak ada salahnya meniru hal yang baik seperti yang ada pada negeri Belanda.

Bentuk persekutuan perdata notaris yang sesuai dengan karakteristik dan profesi notaris yang ada pada pasal 20 UUDN-P harus mengacu kepada pasal 1618 KUHPdt karena pada dasarnya karakteristik persekutuan perdata notaris sama dengan yang dimaksudkan dalam persekutuan perdata pada pasal 1618 KUHPdt, yaitu berdasarkan dengan suatu perjanjian, harus dengan dua orang atau lebih dan memasukkan sesuatu atau modal dalam persekutuan perdata dengan maksud mencari keuntungan. Karena profesi notaris adalah juga pejabat umum negara yang salah satu tugasnya adalah membuat alat bukti yang sah maka hal ini juga akan berkaitan dengan persekutuan perdata notaris yang pada awal pendiriannya menggunakan perjanjian dengan akta otentik.

Sebenarnya persekutuan perdata notaris hanya diatur dalam pasal 20 UUDN-P saja, dan bentuknya pun juga hanya berdasar perjanjian, baik perjanjian dengan akta otentik maupun di bawah tangan, hal ini akan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum. Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 233.

²⁰ Riduan Syahrani, *op.cit.*, hlm. 23.

Perjanjian persekutuan perdata harus memuat kepastian dan kemanfaatan dan keadilan. Isi dari perjanjian persekutuan perdata notaris semestinya berisi dan memuat:

1. Notaris yang diangkat menjadi teman sekutu haruslah yang sudah di sumpah untuk menjalankan jabatannya;
2. Klausula mengenai hak dan kewajiban masing-masing sekutu;
3. Tanggung jawab teman sekutu kepada pihak ketiga;
4. Klausula mengenai pemasukan dan modal.

Dengan adanya aturan mengenai bagaimana perjanjian persekutuan perdata notaris seharusnya dibuat maka akan tercipta Kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²¹

Berbicara mengenai memasukkan sesuatu kedalam persekutuan atau modal dalam persekutuan perdata notaris tidak sama seperti persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan, dalam hal ini para notaris yang bergabung membentuk persekutuan memasukkan benda-benda seperti mesin fotocopy yang digunakan untuk bersama, kursi kantor yang digunakan bersama, komputer yang digunakan bersama, dan biaya biaya yang menjadi tanggungan bersama seperti biaya air, listrik dan biaya sewa gedung. Jadi modal yang dimasukkan kedalam persekutuan perdata notaris adalah sepanjang benda-benda atau biaya-biaya untuk kepentingan kantor bersama

Pasal 1618 KUHPdt menyebutkan bahwa dalam persekutuan salah satu tujuannya adalah membagi keuntungan yang diperoleh karenanya, hal ini tidak berarti bahwa tidak sepenuhnya persekutuan perdata notaris mengambil keuntungan dari persekutuan tersebut. Pasal 36 UUNJ telah menyebutkan tentang bagaimana notaris memperoleh honorarium, notaris memperoleh

²¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.

honorarium atas pekerjaan jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya, dan besarnya honorarium juga sudah ditentukan oleh UUJN. Keuntungan yang diperoleh pada persekutuan perdata notaris adalah hanya sebatas penggunaan gedung dan fasilitas secara bersama-sama, sehingga menghemat biaya.

Sebagai gambaran bila persekutuan notaris di Indonesia bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. persekutuan antara para notaris dalam satu wilayah kerja/ jabatan
2. notaris yang baru diangkat bisa langsung menjadi sekutu dari notaris yang sudah ada;
3. notaris yang pindah dari satu daerah kedaerah yang lain, bisa menjadi teman sekutu dari notaris yang sudah ada di daerah tersebut;
4. untuk kota-kota besar yang pada saat ini hanya bisa diangkat notaris pindahan dari kota lain yang sudah menjalani jabatannya misalnya tiga tahun, sebaiknya dimungkinkan untuk mengangkat notaris yang baru di kota tersebut apabila telah bekerja secara terus menerus di kantor persekutuan untuk jangka waktu tertentu, dan mereka mendapatkan rekomendasi dari kantor notaris tempat mereka bekerja bahwa ia akan diterima sebagai sekutu segera setelah diangkat sebagai notaris;

Persekutuan perdata notaris yang dulu dilarang dalam peraturan jabatan notaris, dalam perkembangannya sekarang dibenarkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Menurut penulis, dengan pertimbangan kemajuan di bidang hukum dengan melihat populasi jabatan notaris yang terus bertambah, disamping belum adanya tindakan yang tepat dan efektif dalam struktur pengaturan ataupun kebijakan dalam mengendalikan jumlah notaris yang terus bertambah, yang secara tidak langsung telah berdampak negatif dalam dunia notaris, antara lain munculnya persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan notaris, maka penulis

berpendapat bahwa persekutuan notaris sebagaimana yang dimaksud merupakan salah satu tindakan yang tepat. Hanya saja kebijakan persekutuan perdata notaris yang diatur pada saat ini yaitu dalam UUJN-P perlu dilakukan dengan perangkat peraturan yang tegas dan jelas, sehingga tidak terjadi kekaburan dalam pelaksanaannya dan menentukan batasan-batasan yang jelas terhadap praktek-praktek yang dilarang dalam persekutuan perdata notaris.

Kemudian perjanjian persekutuan perdata notaris juga harus memuat atau memenuhi asas-asas perjanjian, yaitu pertama asas kebebasan berkontrak, yang terdapat pada pasal 1338 ayat (1) KUHPdt yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Undang-undang memperbolehkan membuat perjanjian berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya. Tujuan dari pembuat perjanjian adalah menuangkan kebebasan berkontrak dalam bentuk formal dan sebagai suatu asas dalam hukum perjanjian. Perjanjian persekutuan perdata yang akan dilakukan oleh para notaris ini dibuat untuk menghindari kekosongan hukum dalam persekutuan perdata notaris yang memang sebelumnya hanya berdasarkan pasal 20 UUJN-P.

Kedua persekutuan perdata harus juga mencerminkan asas Pacta sunt servanda. Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian dibuat oleh para notaris yang ingin bersekutu yang dibuat secara sah oleh para notaris adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti undang-undang, semua pihak yang terikat oleh kesepakatan dalam perjanjian persekutuan perdata notaris yang dibuat.

Ketiga asas Konsensualisme yaitu para notaris yang akan membuat persekutuan perdata telah sepakat, kemudian keempat perjanjian persekutuan perdata yang akan didirikan harus berdasarkan alasan yang baik dan tujuan yang baik sehingga memenuhi asas itikad baik yang terkandung dalam pasal 1338 (2) KUHPdt.

Kelima asas kekuatan berlakunya suatu perjanjian, pada prinsipnya semua perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, tidak ada

pengaruhnya bagi pihak ketiga, yaitu perjanjian hanya berlaku bagi para notaris yang ingin mengadakan persekutuan perdata saja, tidak ada hubungan dengan pihak ketiga atau klien. Hal ini terdapat pada pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPdt.

Keenam asas kepercayaan, yaitu pada prinsipnya seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan diantara pihak lain dalam perjanjian bahwa satu sama lain akan memegang janjinya dan memenuhi prestasinya.

Ketujuh asas persamaan hukum, para notaris yang akan mengadakan persekutuan perdata notaris harus menempatkan para pihak dalam persamaan sederajat, tidak ada perbedaan, sehingga para notaris mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan wajib menghormati satu sama lain. Kedelapan juga berhubungan dengan asas persamaan hukum, yaitu asas keseimbangan yaitu para pihak atau para notaris yang ingin mengadakan persekutuan perdata menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat.

Kesembilan Asas Kepastian hukum, yaitu karena perjanjian yang dibuat dari kekuatan perjanjian itu sebagai undang-undang bagi pembuatnya, dan mengikat para pembuatnya.

Kesepuluh, asas moral yang terkandung dalam pasal 1339 KUHPdt dalam asas ini terdapat faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang membuat perjanjian untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan moral-moral.

Dan yang terakhir asas kesebelas, yaitu asas keseimbangan yang terkandung dalam pasal 1347 KUHPdt perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim.

Dengan adanya aturan mengenai bagaimana perjanjian persekutuan perdata notaris seharusnya dibuat maka akan tercipta Kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-

aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Simpulan

Berdasarkan hasil uraian dari pembahasan pada tesis ini, disimpulkan bahwa:

1. Karakteristik persekutuan perdata notaris sama dengan pasal 1618 KUHPdt. Karakteristik Persekutuan perdata notaris yang diatur dalam UUN-P adalah persekutuan perdata yang bertujuan tidak menjalankan perusahaan dalam artian komersil, para notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi yang diemban sebagai tanggung jawab pekerjaan, keuntungan bukan menjadi bagian atau orientasi dalam menjalankan profesinya. Notaris melakukan pekerjaannya atas dasar dan alasan idiil yang secara teratur dan mandiri dalam bidang tertentu yang memiliki kualitas pribadi yang sangat terpelajar dalam bidangnya dan didasarkan pada kedudukannya sebagai pejabat umum. Persekutuan perdata notaris tidak dapat dikatakan menjalankan perusahaan melainkan persekutuan perdata dalam arti kantor bersama.
2. Bentuk persekutuan perdata notaris di dalam Undang-undang tidak menentukan mengenai cara pendirian persekutuan, sehingga perjanjian perserikatan bentuknya sesuai dengan kesepakatan parapihak dan harus sesuai dengan asas-asas yang ada dalam perjanjian. dapat dilakukan dengan akta otentik ataupun akta dibawah tangan. klien diharapkan secara bebas memilih notaris mana dalam gedung tersebut yang akan digunakan jasanya. Hubungan dengan pihak lain merupakan hubungan secara pribadi demikian juga pertanggungjawabannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ali, Chindir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 2011.
- Ammirudin. *Pengantar Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. buku kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Budiono, Herlien. Makalah pada “seminar tentang Problematika dan Perspektif Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas”, Hotel Puri Gunung, Lembang, Bandung: 17 Oktober 2012.
- Gunawan, Widjaya. *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Komanditer*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hardijan, Rusli. *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Ke, Tan Thong. *Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Projodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur Bandung, 1960.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1994.

Soimin. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2010.

Tobing, GHS. Lumbang. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan Ke-4. Jakarta, Erlangga, 1996.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang *Peraturan Jabatan Notaris*.

Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang – Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.

Naskah Internet

Yasmin, Mersi. “*Kemandirian Notaris Dalam Perserikatan Perdata Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*”.
<http://mersiyasmin.blogspot.co.id/2012/01/kemandirian-notaris-dalam-perserikatan.html>. Diakses 12 Februari 2016.